

1-1-2020

Konfusianisme sebagai Sabuk Pengaman RRT

R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, tutymuas@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>

Recommended Citation

Muas, R. Tuty N. 2020. Konfusianisme sebagai Sabuk Pengaman RRT. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 2 (January). 10.17510/PARADIGMA.V10I2.306.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONFUSIANISME SEBAGAI SABUK PENGAMAN RRT

R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia; tutymuas@gmail.com

DOI: 10.17510/PARADIGMA.V10I2.306

ABSTRACT

The slogans propagated by Chinese leader Hu Jintao—namely “rise in peace”, “a harmonious socialist society”, and “a harmonious world”—reflects the country’s age-old Confucian values. Considering the fact that the PRC only recognizes communism as the state ideology and that Confucianism was subjected to harsh criticism during the Cultural Revolution era (1966–1976), the presence of Confucian values in PRC’s political propaganda becomes an interesting research topic. Both Confucianism and communism put the state as the center of power and sovereignty. This research used the historical-chronological approach by examining the attitude of the PRC government towards Confucianism from 1980 to 2012. Results show that such a consistent philosophy has been successful in strengthening the government’s legitimacy. As it continues to rise, the PRC needs to adopt a robust philosophical basis such as Confucianism to serve as part of its soft power. Confucianism has been adjusted to the country’s current situations and utilized so extensively for decades that it can be considered as PRC’s main vehicle for national development. This article examines and presents the historical role of Confucianism in PRC’s rise.

KEY WORDS

Confucianism; Communism; seatbelt; the rise of China.

ABSTRAK

Berbagai slogan yang dipropagandakan oleh pemimpin Tiongkok Hu Jintao, yaitu “bangkit dalam damai”, “masyarakat sosialis yang harmonis”, dan “dunia yang harmonis”, mencerminkan kehadiran nilai-nilai konfusianisme di dalamnya. Mengingat RRT hanya mengakui paham komunis sebagai ideologinya, dan di era Revolusi Kebudayaan (1966–1976), konfusianisme menjadi sasaran kritik, fenomena nilai-nilai konfusianisme menjadi menarik untuk diteliti. Konfusianisme dan komunisme sama-sama memosisikan negara sebagai pusat kekuasaan dan kedaulatan. Pendekatan historis-kronologis dengan mengkaji sikap pemerintah RRT terhadap konfusianisme dalam periode 1980–2012 menunjukkan bahwa kesamaan cara pandang berguna untuk memperkuat legitimasi berbagai kebijakan pemerintah. Sejalan dengan kebangkitannya, RRT memerlukan budaya yang unggul seperti konfusianisme untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan lunaknya. Konfusianisme diselaraskan dan dimanfaatkan dengan intensif sehingga fungsinya terlihat sebagai sabuk pengaman dalam proses kebangkitan Tiongkok. Artikel

ini mengungkapkan posisi historis konfusianisme dalam kebangkitan RRT.

KATA KUNCI

Konfusianisme; Komunisme; sabuk pengaman; kebangkitan Tiongkok.

1. PENDAHULUAN

Setelah lebih dari dua dekade menjalankan pembangunan yang dipayungi oleh program 改革开放 *gaige-kaifang* (*reformasi dan keterbukaan*), pada awal abad ke-21, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah bangkit menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia. Sejumlah negara di dunia, terutama Amerika Serikat (AS), tampak merasa khawatir melihat kebangkitan RRT yang sangat spektakuler sehingga sejak tahun 1990-an muncul berbagai pandangan tentang ancaman Tiongkok yang kemudian berkembang dalam lingkungan akademis menjadi suatu teori tentang ancaman Tiongkok atau *China threat theory*.¹ Meskipun demikian, RRT menyikapi kekhawatiran sebagian masyarakat dunia itu dengan tetap berpegang pada strategi 28 aksara² yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping. Strategi itu pada intinya mengharuskan para pemimpin RRT untuk tetap *low profile* dan mengedepankan kerja sama (Muas, 2009, 40–42). Menurut Kurlantzick (2006), pada era tahun 1990-an, RRT sedang menjalankan diplomasi tebar pesona (*charm diplomacy*) dengan mengandalkan *soft power* atau kekuatan lunak.

Sejalan dengan merebaknya bahasan tentang *China's soft power*,³ segala sesuatu tentang Konfusius dan konfusianisme menjadi topik utama dalam berbagai forum kajian tentang Tiongkok. Pada tahun 1990-an berkembang 国学热 *guoxue re*⁴ (demam kajian tradisi Tiongkok) yang pada praktiknya lebih berfokus pada kajian tentang Konfusius dan konfusianisme (Peng 2010, 226). Bahkan, pada 2010, di Beijing dirilis film berjudul 孔子 *Kong Zi* (Konfusius) yang dibintangi oleh Chow Yun-Fat. Film itu, pada awalnya, direncanakan dirilis pada akhir 2009 sekaligus untuk memperingati 60 tahun berdirinya RRT dan ulang tahun Konfusius ke-2.560. Namun, waktu rilisnya kemudian diundur dengan alasan yang tidak diketahui. Munculnya *guoxue re* di Tiongkok tampaknya berkaitan erat dengan perkembangan sosial, ekonomis, dan politis RRT terutama setelah peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989. Peristiwa yang diawali oleh aksi demonstrasi mahasiswa, yang akhirnya memakan banyak korban jiwa, telah menyebabkan perekonomian Tiongkok yang baru saja mulai

1 Ada lima faktor yang mendorong munculnya teori ancaman Tiongkok, yaitu 1) pertumbuhan ekonomi RRT pada tahun 1990-an yang mencapai rata-rata 10,2 % per tahun, 2) runtuhnya Uni Sovyet sehingga menyisakan RRT sebagai negara sosialis dengan sistem politik otoriter, 3) peningkatan pengaruh dan kemampuan militer RRT terutama secara regional, 4) anggapan bahwa kegagalan ekonomi RRT kemungkinan dapat menimbulkan bencana sosial-kemanusiaan dan gangguan stabilitas kawasan, dan 5) perkembangan nasionalisme Tiongkok yang mengarah ke *Chinese chauvinism* yang merupakan manifestasi dari sentimen laten anti-Barat dan anti-AS (Yee and Storey 2002, 2–6).

2 Strategi 28 aksara adalah 冷静观察 *leng jing guan cha* (perhatikan dan analisis dengan tenang), 稳住阵脚 *wen zhu zhen jiao* (stabilkan posisi), 沉着应付 *chen zhuo ying fu* (hadapi dengan percaya diri), 韬光养晦 *tao guang yang hui* (sembunyikan kemampuan), 善于守拙 *shan yu shou zhou* (pandai-pandai bersikap “merendah”), 绝不当头 *jue bu dang tou* (jangan memimpin), 有所作为 *you suo zuo wei* (berikan kontribusi).

3 有所作为 (*China Soft Power*) bersumber dari konsep *soft power* yang dirumuskan oleh Joseph Nye Jr pada awal tahun 1990-an. *Soft power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melalui daya tarik alih-alih pemaksaan atau pembayaran. Dalam contoh khas Tiongkok, Du Ruiqing, Mantan Presiden Universitas Studi Internasional Xi'an, mengatakan: “Budaya adalah kekuatan lunak yang secara efektif menembus perbedaan untuk menghilangkan kesalahpahaman dan permusuhan, setelah orang-orang di dunia mengenal Tiongkok dengan lebih baik, mereka akan menemukan bahwa harmoni adalah bagian penting dalam tradisi Tiongkok dan Tiongkok adalah sebuah negara yang menghargai kerukunan, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi seluruh dunia “ (People's Daily Online 2006).

4 Bahasan lebih rinci tentang 国学热 *guoxue re* a.l. dapat ditemukan dalam Xie 2011.

bangkit melalui program *gaige-kaifang* kembali terpuruk, bahkan hampir ke titik nadir. Jatuhnya perekonomian RRT pada saat itu terutama disebabkan oleh hengkangnya para investor dan embargo ekonomi dari sejumlah negara Barat, terutama AS, dan Jepang.

Deng Xiaoping sebagai tokoh sentral Tiongkok pada saat itu menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi moral rakyat, terutama penurunan rasa nasionalisme. Keadaan inilah yang dituding sebagai penyebab utama terjadinya peristiwa Tiananmen 1989 tersebut. Pandangan Deng tercermin dalam cuplikan pidatonya berikut ini.

... 人们支持人权。但不要忘记还有一个国权。谈到人格，不要忘记还有一个国格。特别是像我们这样第三国家的发展中国家，没有民族自尊心，不珍惜自己民族的独立，国家是立不起来的。(邓 Deng 1989, 331).

... Manusia menjunjung hak asasi. Tapi jangan lupa masih ada (sebuah) hak negara. Jika bicara tentang kehormatan, jangan lupa masih ada (sebuah) kehormatan negara. Terutama negara yang sedang berkembang di dunia ketiga seperti negara kita, jika tidak mempunyai rasa hormat terhadap bangsa sendiri, (dan) tidak menghargai kedaulatan bangsa sendiri, negara tidak mungkin berdiri.

Ungkapan kekecewaan atau bahkan kemarahan Deng atas terjadinya peristiwa Tiananmen 1989 tersebut kemudian diikuti dengan penetapan kampanye waspada *和平演变 heping yanbian* (evolusi damai).⁵ Penguasa Tiongkok saat itu seolah-olah baru menyadari kembali bahwa kemajuan ekonomi yang begitu cepat dan semakin terbukanya Tiongkok telah memberi peluang bagi perkembangan budaya asing (AS/Barat). Perkembangan dan pengaruh budaya asing itu secara perlahan tetapi pasti dikhawatirkan akan dapat mengubah kepribadian, bahkan mungkin ideologi bangsa Tiongkok terutama generasi mudanya. Oleh karena itu, kampanye waspada terhadap evolusi damai dijalankan antara lain dalam bentuk *爱国主义运动 aiguo zhuyi yundong* (gerakan patriotisme) dan dengan menggali serta menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Tiongkok. Sejak saat itulah, pembahasan tentang revitalisasi nilai-nilai budaya dan tradisi Tiongkok tampak semakin gencar dilakukan, dan dalam konteks ini posisi dan peran konfusianisme mendapat perhatian utama.

Billioud (2007, 52) mencatat bahwa sejak tahun 1980-an perhatian pada filsafat tradisional Tiongkok, khususnya konfusianisme, mulai muncul, antara lain dapat dilihat dari berdirinya *中国孔子基金会 Zhongguo Kongzi Jijinhui (China Confucius Foundation/CCF)* yang berdiri pada tahun 1984. Perhatian itu terus berlanjut dan berkembang. Slogan yang dikembangkan Hu Jintao sebagai Presiden RRT sejak tahun 2003, yaitu *中国和平崛起 Zhongguo heping chuqi* (kebangkitan damai Tiongkok) yang pada tahun 2004 diubah menjadi *和平发展 heping fazhan* (pembangunan damai), kemudian diikuti dengan *建制和谐社会 jianzhi hexie shehui* (membangun masyarakat yang harmonis) sehingga dapat disebut sebagai momentum peresmian penggunaan nilai-nilai Konfusianisme dalam kebijakan pemerintah RRT.

Hu Jintao adalah pemimpin RRT generasi keempat jika diurut dari era Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Jiang Zemin. Hu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (Sekjen PKT) dan Presiden RRT dalam dua periode, yaitu dalam rentang waktu 2002–2013. Dalam masa kepemimpinannya, terlihat Hu mengandalkan nilai-nilai budaya Tiongkok dalam program unggulannya, dan melakukan upaya sistematis untuk mengaktualkannya, khususnya nilai-nilai konfusianisme. Ketika Hu terpilih untuk kedua kalinya pada

⁵ Evolusi damai adalah upaya memengaruhi transformasi politik Tiongkok lewat cara-cara damai yang dilakukan oleh AS. Frasa itu dicetuskan oleh John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri AS, pada masa Perang Dingin tahun 1950-an. Partai Komunis Tiongkok menganggap proses itu sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan pemerintahan/kekuasaannya (Oudenaren 2015).

2007, dalam pidatonya ia mengemukakan serangkaian slogan yang diusungnya, yaitu 科学发展观 *kexue fazhan guan* (penerapan konsep ilmiah dalam pembangunan), untuk menciptakan 社会主义和谐社会 *Shehui zhuyi hexie shehui* (masyarakat sosialis yang harmonis) dan dengan demikian otomatis turut menciptakan 和谐世界 *hexie shijie* (dunia yang harmonis) (Hu 2007).

Harmoni adalah konsep dasar dalam filsafat kuno Tiongkok, khususnya konfusianisme yang secara spesifik menekankan kata 和 *he* (harmoni) dalam kitab-kitabnya (Delury 2008). Menurut Men Honghua, seorang ahli tentang *soft power* Tiongkok, ada empat nilai dasar dalam budaya Tiongkok yang diwarisi dari konfusianisme, yaitu 和 *he* (damai dan harmonis), 德 *de* (moralitas), 礼 *li* (tata krama), dan 仁 *ren* (kebajikan). Namun, Men Honghua meragukan eksistensi keempat nilai dasar itu dalam masyarakat Tiongkok pada abad ke-21 ini karena, menurutnya, nilai-nilai itu pada era Revolusi Kebudayaan 1966–1976 telah disingkirkan (Shambaugh 2013, 212).

Sudah diketahui umum bahwa, sejak proklamasi 1 Oktober 1949, RRT menganut marxisme-leninisme sebagai ideologi murni dengan pemikiran Mao Zedong sebagai ideologi praktis dan PKT menjadi satu-satunya partai penguasa. Doktrin-doktrin komunisme terus ditanamkan dalam masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Tiongkok, tidak ada peluang untuk paham lain berkembang, termasuk Konfusianisme. Jika kemudian pada era 1990-an muncul berbagai upaya untuk merevitalisasi konfusianisme, itu menimbulkan pelbagai pertanyaan. Mengapa hal itu terjadi? Dan bila dikaitkan dengan kebangkitan RRT, bagaimanakah sesungguhnya posisi dan peran konfusianisme di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis-kronologis untuk mengkaji konfusianisme dan kebangkitan RRT yang signifikan pada periode 1980–2012. Pembahasannya dilakukan dengan mengungkapkan pasang surut konfusianisme dalam perjalanan sejarah Tiongkok hingga era modern, diawali dengan bagaimana konfusianisme pernah disalahkan, mulai dirindukan, lalu dikedepankan keselarasannya dengan komunisme, dan pada akhirnya dimanfaatkan dalam menjalankan pemerintahan RRT hingga mengentaskan Tiongkok sebagai negara yang diperhitungkan dunia.

2. KONFUSIANISME PERNAH DISALAHKAN

Konfusianisme adalah ajaran yang berkembang di Tiongkok sejak era dinasti Zhou, pada abad ke-12 Sebelum Masehi (SM). Istilah konfusianisme mengacu pada nama Konfusius yang lahir pada masa pemerintahan Raja Ling dari dinasti Zhou (551 SM) di negara bagian Lu, yang sekarang bernama Qufu, provinsi Shandong (Li 1978, 71–72; Creel 1989, 28). Sebenarnya, Konfusius terlahir dengan nama kecil Kong Qiu atau Zhong Ni, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Kong Zi. Kata *Zi* pada masa lampau merupakan sebutan bagi seorang guru sebagai tanda penghormatan. Kemudian, Kong Zi juga dikenal dengan sebutan Kong Fuzi, yang dilatinkan oleh para misionaris Jesuit sebagai Konfusius. Ajaran yang diperkenalkannya merupakan filosofi hidup yang menitikberatkan pada kesusilaan dan tata negara.

Pokok ajaran Konfusius mengalami pasang surut dalam sejarah kedinastian Tiongkok. Meskipun demikian, setiap dinasti di Tiongkok mempunyai tradisi menulis sejarahnya sendiri sehingga perkembangan di semua bidang, termasuk ajaran Konfusius, tentu tetap tercatat. Selain itu, monopoli pemerintah/penguasa atas penulisan dan pengajaran sejarah dinastinya turut berkontribusi dalam pemertahanan kesamaan interpretasi ajaran itu. Pemerintah Tiongkok berkepentingan agar rakyat secara umum memiliki pemahaman yang sama atas sejarah bangsanya. Sebagaimana dikatakan oleh Wang Feiling, dalam era kedinastian Tiongkok “menulis sejarah adalah cara untuk membentuk dan mengubah ingatan, termasuk cara pandang terhadap dunia dan berbagai preferensinya” (2015, 46–47).

Dinasti Qing (1644–1911) adalah yang terakhir di Tiongkok. Dinasti ini dijatuhkan oleh revolusi yang pecah pada 10 Oktober 1911 yang juga dikenal dengan sebutan Revolusi 辛亥 *Xin Hai*. Revolusi yang dipimpin oleh Sun Yatsen itu kemudian mendirikan negara Republik Tiongkok. Setelah sistem pemerintahan berubah, kondisi sosial, ekonomis, dan politis Tiongkok tidak serta-merta juga berubah atau berkembang menjadi lebih baik. Terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan Sun Yatsen harus menyerahkan jabatan Presiden Republik Tiongkok kepada Yuan Shikai, yaitu pemimpin para panglima perang dari dinasti Qing. Yuan Shikai sebenarnya berambisi untuk mengembalikan sistem monarki dan menjadi kaisar (Chesneaux, Le Barbier, dan Barbère 1977, 3–20). Pada saat itu sedang berlangsung perang dunia pertama, sejumlah negara Barat masih menguasai beberapa wilayah Tiongkok sebagai daerah konsesi mereka. Pada 1914, Jepang mengambil kesempatan dengan menyatakan perang terhadap Jerman, lalu menyerang dan menguasai wilayah konsesi Jerman di Shandong. Jepang juga berhasil memaksa Yuan Shikai menyetujui perjanjian 21 tuntutan yang diajukannya, yang antara lain menuntut Tiongkok untuk menyerahkan Shandong kepada Jepang (Bai 2009, 474). Perkembangan politik tersebut menyebabkan Tiongkok semakin terpuruk dan rakyat Tiongkok terus bergolak. Kalangan pekerja dan buruh berulang kali melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan, sedangkan kalangan intelektual memotori gerakan budaya baru yang antara lain terwujud dalam penerbitan majalah 青年 *Qingnian* (*Pemuda*) pada 1915, yang setahun kemudian (1916) namanya diubah menjadi 新青年 *Xinqingnian* (*Pemuda Baru*) (Bai 2009, 470–471). Pergolakan rakyat Tiongkok memuncak pada 4 Mei 1919 setelah konferensi perdamaian di Versailles menyatakan perang dunia berakhir, tetapi Sekutu tetap menyerahkan wilayah Shandong kepada Jepang bukan kepada Tiongkok. Dalam sejarah Tiongkok, peristiwa itu kemudian tercatat sebagai 五四运动 *wusi yundong* (*Gerakan 4 Mei*) (Chesneaux, Le Barbier, dan Barbère 1977, 66–67).

Perhatian utama gerakan budaya baru pada era *wusi yundong* tersebut adalah mengedepankan ilmu pengetahuan dan demokrasi. Pilihan ilmu pengetahuan dan demokrasi sebagai isu utama adalah karena yang memotori gerakan merupakan lulusan dan/atau yang pernah belajar di luar Tiongkok, khususnya di Eropa dan Amerika. Mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai paham baru yang cenderung pragmatis dan menganggap perlu godam besar untuk memutus rantai konfusianisme yang mereka anggap sebagai penyebab keterbelakangan dan ketidakmampuan Tiongkok dalam menghadapi tantangan zaman. Konfusianisme dipandang sebagai pencetus hierarki sosial dalam masyarakat Tiongkok tradisional yang melahirkan feodalisme. Di antara mereka bahkan ada yang menganjurkan untuk mengambil jalan westernisasi total (Li 1978, 454–457). Gerakan mengedepankan ilmu pengetahuan dan demokrasi bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung mengandalkan kekuatan supranatural dalam memecahkan masalah kehidupan menjadi bersandar di ilmu pengetahuan. Sementara itu, dalam hubungan sosial, masyarakat hendaknya mengedepankan kesetaraan bukan hierarki karena kesetaraan dipandang sebagai nilai utama dalam demokrasi. Contoh serangan terhadap konfusianisme di era *wusi yundong* dapat ditemukan dalam novel karya Lu Xun yang berjudul 狂人日记 *Kuangren riji* (*Catatan Harian Orang Gila*). Dalam novel itu, diungkapkan bahwa di sela-sela kalimat indah yang tertera dalam *Sishu Wujing*⁶ muncul kata 吃人 *chiren* (pemakan manusia) (Huang 2004, 6). Pengungkapan oleh Lu Xun itu merupakan kritik terhadap ajaran moral konfusianisme yang dianggap justru telah menjerumuskan rakyat Tiongkok ke dalam keterbelakangan dan ketertinggalan dibandingkan dengan capaian bangsa-bangsa Barat. Lu Xun menginginkan kelahiran

6 四书五经 *Sishu Wujing* (*Empat naskah dan Lima Kitab Klasik*). 四书 *Sishu* adalah naskah klasik yang memuat nilai-nilai dan ajaran utama dari konfusianisme yang merupakan rangkuman Zhu Xi, seorang tokoh Neo-Konfusianisme pada era Dinasti Song, sebagai pengantar umum mengenai ajaran Konfusianisme. 五经 *Wujing* adalah lima kitab klasik yang digunakan sebagai dasar ajaran konfusianisme. Kelima kitab ini disusun oleh cendekiawan klasik Tiongkok. Konfusius hanya memberikan komentar, menambahkan, memperbaiki, dan mengompilasi kitab-kitab ini (Yao 2000, 57–64).

budaya Tiongkok baru yang berdasarkan pada standar Barat dan dunia, terutama ilmu pengetahuan dan demokrasi.

Setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok dalam Perang Saudara melawan Partai Nasionalis dan berdirinya RRT, serangan dan kritik terhadap Konfusianisme tidak berhenti bahkan juga berlaku bagi berbagai ajaran lainnya yang hidup dalam masyarakat, seperti Daoisme dan Budhisme. Pada tahun 1949 banyak kuil di pemukiman rakyat dihancurkan, sebagai gantinya rakyat harus menganut paham ateis dan membangun masyarakat industri baru (Johnson 2017, 6). Secara spesifik Peng Guoxiang menggambarkan posisi Konfusianisme pada era 1949–1970-an seperti berikut,

From 1949 until the 1970s was the period of ‘mountains’ climbing and rivers’ curving’, with ‘no way ahead in sight’. The situation of Confucian tradition during that period was deplorable. The Chinese Communist Party (CCP) had not only inherited the anti-traditionalism of the May Fourth Movement but also carried it to an extreme. Anything Confucian became a target of attack, or, to use an expression current in the 1960s and 1970s, ‘a target of proletarian dictatorship’, which should be ‘swept into the dustbin of history’. (2010, 225–26).

Gambaran Peng tersebut menunjukkan bahwa sepanjang era kekuasaan Mao Zedong, konfusianisme tidak mungkin dibahas secara terbuka, apalagi diajarkan. Kalaupun ada yang masih melakukannya, pastilah dengan cara diam-diam dan di lingkungan yang sangat tertutup.

Kritik terhadap konfusianisme memuncak pada masa Revolusi Kebudayaan yang digagas oleh Mao Zedong dan sekutunya pada 1966. Konfusianisme dipandang sebagai bagian dari 四旧 *sijiu* (Empat Lama)⁷ yang menyebabkan feodalisme dan eksploitasi kelas. Pada masa itu, Tentara Merah merusak semua simbol yang berhubungan dengan konfusianisme di seluruh negeri, terutama di Qufu, yaitu kampung halaman Konfusius. Buku-buku ajaran konfusianisme dibakar dan orang-orang yang dicurigai sebagai penganut tradisi lama, termasuk konfusianisme, dicap sebagai 阶级敌人 *jieji diren* (musuh kelas) dan diadili dalam pengadilan umum (Fairbank dan Goldman 2006, 393; Hu 1994, 639). Mao Zedong menganggap konfusianisme bertentangan dengan marxisme. Menurutnya, marxisme menekankan pada konflik dan perjuangan kelas untuk mencapai kesejahteraan sosial, sementara konfusianisme justru menekankan pada keharmonisan sosial, hal-hal supranatural, dan kejayaan pada masa lampau.

Kehidupan spiritual bangsa Tiongkok sejak RRT berdiri didominasi oleh doktrin-doktrin komunisme yang lebih mementingkan aturan-aturan tentang politik dan kekuasaan. Setelah keadaan itu berlangsung lebih dari tiga dekade, sejumlah orang mulai meragukan apakah tradisi dan budaya bangsa Tiongkok yang berbasis konfusianisme masih diingat atau dipraktikkan oleh rakyat, atau khususnya oleh generasi muda Tiongkok yang lahir pada era Mao Zedong atau sesudahnya. Keraguan Men Honghua seperti disebutkan di awal, juga diakui oleh sinolog terkemuka Wang Gungwu. Namun, dalam karyanya ia tetap menyatakan optimismenya bahwa warisan budaya Tiongkok akan tetap diingat dan tidak mudah luntur. Berikut ini kutipan pernyataan Wang (1991, 296–297).

It is possible that a new proletarian worker-intellectual who open to modern world which is itself increasingly proletarian in its cultural values would systematically undermine the Chinese traditions of the past. ... I would venture to suggest that much of his Chinese heritage would remain with him for very long time to come.

⁷ 四旧 *sijiu* (Empat Lama) menunjuk pada empat warisan budaya Tiongkok yang harus disingkirkan, yaitu yang berkaitan dengan pemikiran, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lama.

Keyakinan Wang didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi dan kebudayaan Tiongkok sudah tumbuh dan berkembang selama ribuan tahun. Sengaja atau tidak, tradisi yang berbasis konfusianisme masih tetap dipraktikkan secara turun-temurun sehingga, meskipun mungkin terjadi penurunan pengetahuan konfusianisme di kalangan generasi muda Tiongkok, akar pengetahuan itu diyakini pasti masih tertanam dalam. Selain itu, menurut 黃維樑 Huang Weilian (2004, 4), meskipun konfusianisme memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, menimpakan keterbelakangan Tiongkok kepada Konfusius dianggapnya tidak adil. Konfusius menurutnya sangat memuliakan manusia dan mengedepankan kebajikan. Ajaran itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah lapuk, konfusianisme adalah hasil olah pikir manusia, harus selalu dikaji ulang secara ilmiah agar sesuai dengan tantangan zaman.

3. KONFUSIANISME MULAI DIRINDUKAN

Pada tahun 1976 Mao Zedong meninggal dan berakhir pula era pemerintahannya. Setelah melalui pertarungan politis yang cukup pelik, Deng Xiaoping muncul sebagai pemimpin dengan program *gaige-kaifang* yang memuat berbagai rencana perubahan terutama di bidang ekonomi dan membuka pintu Tiongkok bagi dunia luar. Program itu dijalankan dengan berpedoman pada semangat 走自己的路 *zou zijidelu* (berjalan pada jalan/cara (Tiongkok) sendiri). Deng Xiaoping perlu menegaskan pedoman itu karena ada sejumlah pihak yang mengkhawatirkan langkah *gaige-kaifang* akan mencemari ideologi komunis yang dianut Tiongkok. Prinsip *zou zijidelu* menetapkan bahwa sosialisme yang diterapkan di Tiongkok adalah 有中国特色的社会主义 *you Zhongguotese de shehuizhuyi* (sosialisme berkarakter Tiongkok) (赵 Zhao dan 肖 Xiao 1989, 188). Konsep sosialisme berkarakter Tiongkok ini mencakup sembilan hal mendasar,⁸ di antaranya Tiongkok saat itu ada di 社会主义 初级阶段 *shehuizhuyi chuji jieduan* (tahap awal sosialisme) (赵 Zhao, 席 Xi, dan 翁 Weng 1999, 351). Semua ketetapan itu memungkinkan RRT menerapkan ekonomi pasar yang sebenarnya merupakan ciri ekonomi kapitalis. Dalam hal ini, Tiongkok mengembangkan retorika bahwa ekonomi pasar bukanlah mutlak milik sistem kapitalis. Ekonomi terencana yang menjadi ciri sistem sosialis juga dimungkinkan untuk menjalankan ekonomi pasar, yang disebut ekonomi pasar sosialis (邓 Deng 1979, 236). Ditambah lagi, karena sosialisme yang diterapkan RRT masih di tahap awal, wajar jika masih ada praktik-praktik kapitalisme di dalamnya.

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa RRT sejak melaksanakan *gaige-kaifang* cenderung melonggarkan ideologinya. Pada 1981 Deng menghapus sistem 人民公社 *renmin gongshe* (komune)⁹ yang menyebabkan pola dan tradisi kehidupan di perdesaan kembali ke asal, termasuk tradisi menjalankan ritual yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun agama tertentu. Sebaliknya, fokus pembangunan lebih

8 Sembilan hal pokok yang dicakup sosialisme berkarakter Tiongkok adalah 1) Dalam pencapaian sosialisme, RRT mengambil jalan sendiri, 2) dalam tahapan mencapai sosialisme, RRT berada di tahap awal dari sosialisme itu, 3) tugas dasar sosialisme adalah membebaskan dan mengembangkan tenaga produksi, 4) gerakan, reformasi, dan pengembangan juga merupakan revolusi, 5) dalam kaitan dengan dunia, targetnya adalah perdamaian dan kemajuan, RRT harus memanfaatkan suasana damai untuk membangun dirinya, 6) dalam pembangunan politik, RRT berlandaskan empat prinsip dasar, yaitu tetap berpegang pada sosialisme, kediktatoran proletar, kepemimpinan PKT, dan Marxisme-Leninisme dan pikiran Mao, 7) mengajukan strategi tiga tahap pencapaian sosialisme, 8) PKT adalah kepemimpinan utama dengan basis kekuatan kaum buruh, petani, intelektual, dan suku-suku di berbagai wilayah RRT, dan 9) dalam menjaga kesatuan, RRT menerapkan satu negara dua sistem.

9 Arti kata komune (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2016) adalah wilayah administrasi terkecil yang ditandai oleh pemilikan dan penggunaan hak secara kolektif. Dalam sejarah Tiongkok, Mao Zedong, ketika menjalankan program 大跃进 *da yuejin* (lompatan jauh ke depan) tahun 1958, telah memaksa rakyat untuk hidup dalam komune. *Da yuejin* merupakan program pembangunan yang dicanangkan Mao dengan target membuat RRT menyamai Inggris dalam 15 tahun. Oleh karena itu, rakyat dikelompokkan dalam komune-komune dengan tujuan agar produktivitasnya meningkat dengan cepat. Kebijakan itu menimbulkan dampak sosial yang amat buruk, antara lain hancurnya pranata keluarga karena anggota keluarga hidup tercerai-berai dalam komune yang berbeda-beda.

terkonsentrasi ke perkotaan sehingga pengawasan pemerintah atas kegiatan masyarakat di pedesaan lebih longgar. Bahkan, pemerintah cenderung mendukung perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi dan bersifat spiritual dengan mengategorikannya sebagai pengembangan warisan budaya (Fan dan Chen 2013, 8–9). Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara masif berpengaruh besar pada kehidupan spiritual dan keagamaan masyarakat. Johnson (2017) dalam bukunya menunjukkan pengaruh dan perubahan itu secara komprehensif.

Contoh yang dikemukakannya antara lain yang terjadi di Beijing. Pemerintah kota Beijing, dalam upayanya membangun kota dengan gedung dan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup internasional, tidak dapat menghindari pemindahan (penggusuran) sejumlah warga atau penduduk “asli” Beijing ke pinggiran atau ke kota lain. Sebagian besar penduduk Beijing itu digantikan oleh para migran atau pekerja dari berbagai kota, atau bahkan dari negara lain yang memiliki latar sosial, budaya, dan agama atau sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Perkembangan itu menumbuhkan budaya baru yang tercakup di dalamnya unsur religi. Perkembangan itu sesungguhnya bertentangan dengan komunisme yang ateis, tetapi pemerintah RRT yang sedang memfokuskan diri pada keberhasilan pembangunan ekonomi, tidak mungkin sepenuhnya menghindari hal tersebut dan bahkan membiarkannya sepanjang praktik keagamaan tidak bertentangan dengan peran atau garis partai/PKT (Johnson 2017, 6 dan 396). Situasi itu pulalah yang menyebabkan konfusianisme mulai mendapat ruang dan terlihat bangkit kembali walaupun masih diselimuti oleh banyak kontroversi. Fenomena kebangkitan itu kemudian terwujud secara institusional, yaitu dengan pendirian *China Confucius Foundation* (CCF) pada 1984, dengan dukungan finansial dari pemerintah pusat (Peng 2010, 227). Dengan demikian, masa itu dapat disebut awal kebangkitan konfusianisme di Tiongkok.

Peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989 menjadi momentum penting lain bagi kebangkitan kembali konfusianisme di Tiongkok. Tekanan rezim dengan pengaruh kuat dari Deng Xiaoping, yang menyatakan bahwa “peristiwa Tiananmen itu telah mengancam kedaulatan dan kehormatan negara”, berhasil menyatukan bangsa Tiongkok. Bagi rakyat Tiongkok, menyelamatkan kehormatan dan kedaulatan bangsa mempunyai makna yang sangat berarti dalam kaitannya dengan semangat nasionalisme. Hal itu berhubungan erat dengan 强中国梦 *qiangguomeng* (mimpi (menjadi) negara kuat) yang bebas dari tekanan kekuatan atau negara mana pun. Mimpi itu tumbuh seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Tiongkok sejak perang candu pertama yang terjadi pada tahun 1839–1842. Kekalahan Tiongkok dalam perang melawan Inggris itu telah menjadi awal masuknya Tiongkok ke era *hypo colony*.¹⁰ Sejumlah wilayah di Tiongkok menjadi wilayah konsesi asing sehingga secara politis seperti ada negara dalam negara. Era yang dirasakan oleh bangsa Tiongkok amat menyakitkan dan memalukan itu melahirkan semangat dan kegeraman yang mampu membuat mereka amat sensitif terhadap masalah kedaulatan atau kehormatan negara dan bangsanya. Oleh karena itu, setelah peristiwa Tiananmen 1989, Deng Xiaoping menyatakan bahwa ada ancaman terhadap kedaulatan negara dan seruan yang dikumandangkannya mengandung nilai-nilai moral yang diajarkan Konfusius, seruan itu menjadi sangat efektif. Slogan tentang konfusianisme sebagai simbol kehormatan dan kedaulatan berbasis budaya bangsa menjadi alat yang amat efektif bagi PKT untuk merebut kembali hati rakyat Tiongkok.

Kebangkitan konfusianisme terus meluas pada tahun 1990-an hingga muncul fenomena *guoxue re* yang memperlihatkan kerinduan masyarakat pada tradisi, nilai-nilai spiritual, dan ajaran moral, khususnya konfusianisme. Kajian tentang konfusianisme terus merebak baik di kalangan akademisi maupun masyarakat, dan didukung pula oleh media massa (Peng 2010, 226). Secara lebih spesifik, Billioud dan Thoraval (2007, 10) menggambarkan bahwa pengajaran naskah klasik Konfusius menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler

¹⁰ *Hypo Colony* adalah istilah yang dikemukakan oleh Sun Yatsen untuk menggambarkan bahwa Tiongkok pada awal abad ke-20 tidak hanya dijajah oleh satu bangsa saja, melainkan oleh beberapa bangsa sekaligus (Franklin 2019).

di sejumlah sekolah dasar. Pengajaran untuk murid di tingkat menengah atau untuk orang muda dan dewasa disebut 学堂 *xuetang*, dan untuk kajian yang lebih akademis disebut 书院 *Shuyuan*. Semangat mempelajari dan mengajarkan kembali ajaran moral Konfusius menyebar ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh Tiongkok. Sejumlah orang terlibat secara suka rela, tetapi ada pula yang menjadikannya bisnis sampingan, terutama dalam kaitan dengan penyediaan atau pencetakan dan distribusi bahan ajar, bahkan sejumlah media *online* juga berperan di dalamnya.

Melalui media televisi, muncul tokoh Yu Dan, yaitu seorang profesor muda yang memandu acara *The Lecture Room*. Acara itu mengangkat kembali ajaran-ajaran Konfusius untuk menjadi pedoman dalam mencapai kehidupan bahagia di dunia modern yang terus berkembang dan penuh tantangan. *The Lecture Room* berhasil menjadi acara favorit pemirsa televisi di banyak kota besar Tiongkok. Kumpulan bahasan dalam acara itu kemudian dijadikan buku berjudul 論語心得 *Lunyu xinde* (*Ajaran Konfusius dari Hati*). Edisi bahasa Inggris dari buku itu terbit pada tahun 2006 dan berhasil menjadi buku terlaris dengan jumlah penjualan resmi mencapai 4,2 juta, sedangkan bajakannya diperkirakan terjual hingga 6 juta buku (Melvin 2007).

Pengajaran dan atau penyebaran konfusianisme pada awalnya sering berbenturan dengan masalah legalitas, misalnya izin untuk melaksanakan pelatihan atau pengajaran secara terbuka tidaklah mudah. Namun, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang sedang terfokus ke pembangunan ekonomi dan cenderung melonggarkan ideologi, tidak terlihat sikap penolakan dari pemerintah, bahkan semakin terlihat bahwa pemerintah juga berjalan ke arah yang sama. Kondisi itu membuat kegiatan penyebaran konfusianisme yang sebenarnya sangat masif itu menjadi terlihat spontan, bukan sebagai sebuah kebijakan yang bersifat *top-down* atau indoktrinasi yang menjadi ciri penerapan kebijakan di negara komunis. Meskipun demikian, ada sejumlah pihak yang merasa pesimis terhadap kemurnian tujuan para inisiator yang membangkitkan kembali konfusianisme tersebut. Peng (2010, 230–234) mengkhawatirkan bahwa komersialisasi dan politisasi kegiatan itu dapat mengaburkan tujuan untuk mencapai masyarakat lebih beradab sebagaimana yang diajarkan Konfusius. Menurutnya, internalisasi nilai-nilai konfusianisme tidak dapat hanya diukur dari banyaknya ujaran-ujaran Konfusius yang dikutip oleh para pemimpin Tiongkok atau jumlah pelatihan/kursus atau jumlah peserta pelatihan, melainkan harus ada upaya mendasar yang dilaksanakan secara konsisten, antara lain melalui sistem pendidikan dan kurikulumnya, artinya ajaran dan nilai-nilai Konfusianis ditransfer tanpa ada korupsi dalam prosesnya. Kekhawatiran Peng dan sejumlah orang lain dapat dimaklumi, tetapi tumbuhnya keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya sebagaimana terungkap dalam buku yang ditulis oleh Johnson (2017), juga menjadi perhatian pemerintah. Perkembangan *guoxue re* misalnya, dapat menjadi salah satu indikator adanya kerinduan atau bahkan pengakuan rakyat Tiongkok akan nilai-nilai tradisionalnya yang dalam hal ini ternyata terfokus pada Konfusianisme.

4. KESELARASAN KONFUSIANISME

Pada dasarnya, konfusianisme adalah doktrin tentang etika dan moralitas kemanusiaan demi mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Moralitas merupakan karakteristik teori dan praktik Konfusianisme (Yao 2000, 32). Ajarannya dijabarkan dalam kitab *Sishu Wujing*. Etika konfusianis secara integral juga mencakup aspek religius, politis, edukatif, psikologis, dan metafisik. Ajaran Konfusius yang mengatur hubungan antarmanusia adalah 五伦 *wulun* (lima hubungan), yang antara lain dapat disimak dalam kitab *Zhong yong* berikut ini.

天下之达道五，所以行之者三，曰君臣也，父子也，夫妻也，昆弟也，朋友之交也，五者，天下之达道也，知，仁，勇，三者，天下之达德也，所以行者一也。(Legge 2017, 384–385; MATAKIN 2012, 61)

Kewajiban utama di dunia ada lima, dan kebajikan yang harus diamalkan ada tiga, yaitu hubungan antara raja dengan menteri, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, kakak dengan adik, dan hubungan di antara kawan, kelimanya merupakan kewajiban yang harus dijalankan di dunia. Pengetahuan/kebijaksanaan, keluhuran budi, dan keberanian, ketiganya merupakan kebajikan/moral yang harus diamalkan di dunia; menjalankannya haruslah dalam kesatuan.

Wulun mengatur tata hubungan manusia di dunia, berdasarkan legalitas (raja dengan menteri), kedekatan (ayah dengan anak), perbedaan (suami dengan istri), keteraturan (kakak dengan adik), dan kesetiaan (sesama teman), yang semuanya dilaksanakan dengan berpedoman pada 德 *de* (nilai-nilai kebajikan). Dalam kutipan di atas, terungkap tiga nilai kebajikan, yaitu kebijaksanaan, keluhuran budi, dan keberanian yang harus diamalkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan di dunia, penganut Khonghucu¹¹ harus selalu berpegang dan mengamalkan 八德 *ba de* (delapan kebajikan), yaitu *xiao-di-zhong-xin-li-yi-lian-chi* atau 'berbakti - rendah hati – setia - dapat dipercaya - cinta kebenaran - suci hati - tahu malu.¹² Pola hubungan dalam *wulun* menuntut manusia untuk berperilaku sesuai posisinya dalam masyarakat sehingga dapat tercipta keharmonisan. Ajaran itu masih dilengkapi lagi dengan konsep 正名 *zhengming* (nama/penamaan yang tepat). Praktiknya adalah bahwa segala sesuatu harus menempatkan atau ditempatkan sesuai dengan nama, posisi, ataupun predikat yang melekat padanya.

Dalam tradisi Tiongkok keberadaan negara merupakan kelanjutan dari keluarga dan masyarakat yang dilandasi oleh kebutuhan untuk menciptakan harmoni atau keselarasan. Tata negara atau sistem pemerintahan Tiongkok tercatat mulai terbentuk pada era dinasti Qin (abad ke-3 SM) yang kemudian dikenal sebagai konsep sistem 天下 *Tianxia* yang menganggap bahwa dunia adalah satu dan berada di bawah kekuasaan Langit atau 天 *Tian* (Wang 2015, 47). Keabsahan sebuah pemerintahan diperoleh berlandaskan asas sentralisme, hierarkis, dan penggunaan kekerasan. 上帝 *Shangdi* (Kaisar) merupakan satu-satunya sumber kekuatan dan kekuasaan karena ia adalah 天子 *Tianzi* (Putra Langit) (Keith 2009, 53). Semua pejabat pemerintah dan birokrasi ditunjuk secara hierarkis untuk menjalankan pemerintahan yang dikuasai oleh kaisar. Tidak boleh ada oposisi, kekuatan sosial-ekonomi, dan kelompok keagamaan yang menentang kekuasaan kaisar. Konfusius merumuskan konsep ini dalam kalimat "seluruh daratan di bawah langit adalah milik kaisar, dan seluruh manusia yang ada di daratan itu adalah hamba/kawula kaisar" (Wang 2015, 48). Konsep dasar tata negara itu terus berkembang di Tiongkok dari satu dinasti ke dinasti lain selama ribuan tahun. Konfusius memperkaya tatanan ini dengan ajaran tentang moral atau kesusilaan. Konfusianisme menekankan pada pentingnya moralitas pribadi dan pemerintahan, hubungan sosial yang harmonis, keadilan, dan ketulusan. Konfusianisme tidak menekankan eksistensi manusia sebagai pribadi, melainkan manusia sebagai bagian dari masyarakat (De Mente 1996, 247). Pemerintahan yang baik, menurut Konfusius, bergantung pada moralitas untuk mencegah kesalahan, bukan pada hukum yang digunakan untuk menghukum yang bersalah. Ada tiga hal esensial untuk membentuk pemerintahan yang baik, yaitu kecukupan pangan, pertahanan yang memadai, serta moral, dan yang terpenting di antara ketiganya adalah

11 Di Indonesia Khonghucu merupakan salah satu agama yang diakui negara, penganut Khonghucu mengamalkan ajaran Konfusius dan kitab sucinya adalah *Si shu–Wu jing* yang merupakan karya-karya Konfusius dan Mengzi.

12 八德：孝 - 第 - 忠 - 信 - 礼 - 义 - 廉 - 耻, kedelapan nilai ini mempunyai bobot keharusan yang sama dalam pengamalannya (Muas 2015, 69).

moral. Konfusius percaya bahwa, jika kekuasaan diterapkan secara benar dan hati-hati, kedamaian dan keteraturan akan terwujud (Li 1978, 75). Dengan demikian, konfusianisme tidak hanya menyediakan format ideologi bagi negara tetapi juga kewenangan dengan standar moral, pemikiran, dan perilakunya (Yao 2000, 34).

Negara, menurut seorang ekonom politik Jerman, Max Weber (1958), adalah “*a human community that (successfully) claims the monopoly of legitimate use of physical force within a given territory*”. Wibowo (2000, 3) mengacu pada konsep itu untuk merumuskan bahwa negara adalah asosiasi politis, yang di dalamnya kekuasaan dan kekerasan digunakan untuk menuntut ketaatan dari warganya dalam mengejar tujuan negara. Dalam rumusan itu, tersirat bahwa konfusianisme juga menyediakan pedoman yang jelas bagi negara untuk menjalankan kewenangan atas rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya. Penguasa negara, meskipun mempunyai kekuasaan absolut, harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan moral yang ditetapkan demi terciptanya masyarakat yang harmonis. Dalam *Gongyang Zhuan*, yang merupakan tafsir kitab *Chunqiu* karya Konfusius, juga ditegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politis harus bersumber pada tiga unsur, yaitu legitimasi dari **langit** (moralitas alam yang suci), **bumi** (kebijaksanaan yang diperoleh dari sejarah dan budaya), dan **manusia** (kepatuhan politik melalui kehendak rakyat) (Jiang dan Bell 2012).

Sementara itu, sosialisme-komunisme yang merupakan buah pikiran Karl Marx, mulai muncul dan berkembang pada awal abad ke-19 sebagai reaksi atau koreksi terhadap kapitalisme, menentang akumulasi modal pada individu, dan menekankan pentingnya perjuangan kelas untuk pencapaian kesetaraan dalam masyarakat. Kehadiran Marxisme yang disertai dengan perkembangan semangat kemenangan revolusi Bolsheviks di Rusia, mendapat sambutan hangat di Tiongkok karena dianggap sebagai satu alternatif yang tepat untuk mengatasi kekacauan sosial, politis, dan ekonomis Tiongkok pada saat itu (Fairbank dan Goldman 2006, 275; Hu 1994, 15). Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang didirikan pada 1921 berhasil merebut simpati rakyat dan mengalahkan rezim Partai Nasionalis Tiongkok (PNT) sehingga berdirilah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) pada 1949. RRT menerapkan model kediktatoran proletariat untuk mengelola negara. Negara memiliki dan sekaligus mengontrol kekuatan produktif masyarakat. Dalam hal ini, negara mempunyai wewenang untuk melakukan kontrol total atas produktivitas rakyatnya. Sebagaimana Lenin, yang sudah menerapkan model ini di Rusia, mengatakan bahwa di bawah model ini “seluruh masyarakat akan menjadi satu kantor dan satu pabrik” (Wibowo 2000, 88).

Uraian di atas menunjukkan bahwa konfusianisme ataupun komunisme menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan yang mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan. Konfusianisme mengarahkan tujuan untuk terciptanya masyarakat yang harmonis, sedangkan komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas yang sama rata dan sama rasa. Ada sejumlah perbedaan dan persamaan lain di antara konfusianisme dan komunisme. Jacques dalam buku yang ditulisnya mengutip pernyataan Roy Bin Wong seorang sejarawan ekonomi Tiongkok sebagai berikut.

... walaupun terdapat perbedaan jelas antara ideologi Konfusian dan ideologi Komunis – hierarki versus pemerataan, konservatisme versus radikalisme, harmoni versus konflik – namun ada pula kesamaan-kesamaan penting antara kedua tradisi tersebut. Seperti pada zaman Mao¹³, misalnya, tradisi Konfusian juga menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan, membatasi kepemilikan tanah, dan redistribusi tanah (2011, 102).

13 Dalam konteks ini yang dimaksud a.l. adalah program Reformasi sistem 土地改革 *tudi gaige* (kepemilikan tanah) yang dilaksanakan oleh Mao Zedong sejak dia mulai membentuk basis-basis merah di *Jinggang shan*

Lebih lanjut lagi, secara politis juga ada kesejajaran antara Konfusianisme dan Komunisme. Keduanya mengandung suatu kontrak implisit antara rakyat dan negara. Jika negara gagal memenuhi kewajibannya, petani, menurut Konfusiusme, berhak mencabut 天命 *Tianming* (Mandat Langit) dari kaisar, sedangkan dalam komunisme, buruh berhak memberontak atau melakukan revolusi atas nama perjuangan kelas (Jacques 2011, 103).

Beberapa kesamaan konsep yang ada di antara konfusianisme dan komunisme, khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi negara, memudahkan PKT/RRT untuk memunculkan keselarasan di antara kedua paham itu. Hal itu berguna untuk memperkuat legitimasi berbagai kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, pendapat Yao Xinzhong berikut ini juga dapat mempertegasnya

Confucianism was the dominant school of thought and orthodox ideology for the most part of two thousand years, exercising both dogmatic and dynamic functions. It was dogmatic in maintaining and strengthening its dominance, but it was also flexible enough to adapt to different environments and situations, shaping and reshaping itself constantly and synthesising new ideas from other school (2000, 31).

Lebih jauh, Yao menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya konfusianisme adalah tradisi Tiongkok yang mencerminkan sikap bangsa Tiongkok terhadap kehidupan dan dunia, ketika menyebar ke wilayah Asia Timur, berkembang dan menjadi bagian dari budaya Jepang dan Korea. Sifat dinamis yang dimiliki konfusianisme itu pula tampaknya yang memudahkan RRT/PKT dalam menyelaraskan dan memanfaatkannya.

Pada awalnya, memang banyak kekhawatiran dan kendala untuk menghadirkan konfusianisme secara institusional karena sebuah institusi membutuhkan legitimasi dari penguasa (Billioud dan Thoraval 2007, 6). Kehadiran sebuah institusi, apalagi yang jelas-jelas memiliki paham atau ajaran tertentu seperti konfusianisme, tentu akan membawa implikasi sosial, budaya, ekonomis, dan bahkan politis yang tentu saja merupakan hal yang peka di lingkungan pemerintahan Komunis seperti RRT. Kepekaan itu berkaitan dengan sistem politik RRT yang menempatkan PKT sebagai penguasa tunggal. Sebuah paham baru hanya dapat berkembang jika pengaruhnya tidak mengancam otoritas PKT. Paparan selanjutnya akan mengungkapkan perkembangan sikap dan kebijakan PKT/RRT dalam memanfaatkan keselarasan yang ada di antara kedua paham itu, khususnya pada era Hu Jintao.

5. PEMANFAATAN KONFUSIANISME

Kebijakan *gaige-kaifang* atau reformasi dan keterbukaan yang dicanangkan Deng Xiaoping pada 1978 berkembang sangat masif sehingga pada tahun 1980-an Tiongkok berhasil meningkatkan pembangunan ekonominya walaupun diguncang beberapa kali oleh gerakan protes massa. Peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989 menjadi puncak dari gerakan itu dan tercatat sebagai peristiwa kelam dalam sejarah Tiongkok. Terjadinya guncangan sosial dan politis bukanlah semata-mata disebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar, tetapi juga karena pengaruh pesona budaya Barat yang tidak terbandung. Pesona itu datang baik dalam kemasan budaya (agama) Kristen maupun dalam bentuk budaya populer yang tersebar melalui jaringan Internet atau media komunikasi lain (Billioud 2007, 51). Pelaksanaan program reformasi dan keterbukaan yang menekankan pada 四个现代化 *si ge xiandaihua* (modernisasi di empat bidang) telah membuat dunia usaha menjadi harapan utama masyarakat Tiongkok. 黄道根 Huang Daogen (1990, 68) menggambarkan situasi itu dalam ungkapan seperti berikut

中国自1978年起实施四个现代化措施,接着又开始采取改革开放的政策。邀请外资流入并鼓励联合投资。在社会上成一般企业主义浪潮,中国年轻一代及知识阶层已有了新认识。加上经济持续开放,似乎显示出这个亚洲巨人正面临着缓慢而深刻的转型,它正重新燃起外国人涉足这个全球最大的潜在市场的希望之火。

Sejak tahun 1978 Tiongkok mewujudkan berbagai fasilitas terkait dengan empat modernisasi, selanjutnya juga melaksanakan kebijakan reformasi dan keterbukaan, mengundang masuknya investasi asing dan mendorong kerjasama penanaman modal, [sehingga] dalam masyarakat terbentuk kecenderungan umum terhadap paham korporasi, di kalangan generasi muda dan intelektual Tiongkok muncul pemahaman baru (tentang modernisasi ekonomi), dan ditambah pula dengan terjadinya liberasi ekonomi terlihat bahwa raksasa Asia sedang menghadapi transformasi yang lambat, tetapi mendalam. Dia sedang menyalakan kembali api harapan dari keterlibatan asing dalam pasar yang paling besar dan potensial di seluruh dunia.

Gambaran kecenderungan masyarakat Tiongkok yang terungkap di atas sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah Tiongkok yang menetapkan bidang ekonomi sebagai titik sentral pembangunannya. Salah satu di antaranya adalah memberi tekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam gerakan 下海 *xiahai* (turun ke lautan) yang memungkinkan rakyat Tiongkok mengembangkan usaha pribadi (Muas 2015, 169). Gerakan itu mendapat dorongan yang kuat karena pada saat yang sama RRT menerapkan sistem ekonomi pasar. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tidak berarti membuat seluruh rakyat terentaskan dari garis kemiskinan. Kenyataan yang terlihat justru sebaliknya. Jurang kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Seperti banyak negara yang telah mengalami transformasi melalui pembangunan ekonominya, di Tiongkok juga muncul fenomena orang-orang yang mengalami depresi karena atmosfer persaingan yang ketat dan ikatan kekeluargaan yang semakin longgar, serta munculnya aspirasi baru yang tidak hanya berkaitan dengan materi semata. Seorang warga Beijing, ketika diwawancarai tentang hal ini, mengatakan, “*We thought we were unhappy because we were poor. But now a lot of us aren’t poor anymore, and yet we’re still unhappy. We realize there’s something missing and that’s a spiritual life.*” (Johnson 2017, 16–17).

Rakyat Tiongkok yang terlarut dalam euforia keterbukaan sejak era *gaige-kaifang* terlihat cenderung dengan mudahnya mengambil alih nilai-nilai luar yang datang mengalir dengan deras. Banyak dari mereka, terutama generasi muda, menjadi *western oriented*. Selain itu, akibat kebijakan satu anak yang diterapkan pada tahun 1980-an terutama bagi warga dari suku Han menyebabkan banyak keluarga hanya memiliki satu anak yang berimbas pada kecenderungan memanjakan anak secara berlebihan. Sebagai dampaknya, ketika dewasa banyak yang kemudian cenderung menjadi egois, manja, individualis, dan materialistis. Shambaugh (2016) menggambarkan bahwa peningkatan kemakmuran dan kualitas kehidupan disertai masalah dan tantangan lain yang serius bagi Tiongkok.¹⁴

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi RRT sejalan dengan kebangkitannya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di lingkungan internasional. Munculnya kekuatan ekonomi Tiongkok secara spektakuler di era 1990-an menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Yee dan Storey (2002, 1) menyebutkan bahwa RRT sebagai kekuatan yang baru bangkit dapat menjadi sumber ketidakstabilan baik secara regional maupun internasional. Karena itulah, Tiongkok disebut ancaman oleh para pengamat Tiongkok baik di Barat maupun di negara tetangga. Mearsheimer (2004) bahkan mengatakan bahwa kebangkitan RRT tidaklah akan membawa damai, karena jika semakin berjaya Tiongkok akan bersaing dengan AS dan itu berpotensi memicu perang. Selain itu, secara teoretis kesintasan (*survival*), mempertahankan eksistensi

14 Informasi terperinci tentang masalah dan tantangan yang dihadapi Tiongkok lihat Shambaugh (2016).

dan kedaulatannya adalah tujuan utama semua negara. Jika tidak mampu bertahan hidup, tidak akan ada capaian sebagaimana yang ditugaskan pada negara. Kekhawatiran berbagai negara itu semakin beralasan ketika RRT terlibat dalam konflik kepentingan dan sengketa wilayah dengan beberapa negara tetangganya di Laut Tiongkok Selatan dan Kepulauan Senkaku.

RRT tentu saja selalu berupaya menepis berbagai kekhawatiran yang menyertai kebangkitan Tiongkok tersebut, antara lain dengan melunakkan slogan yang diusungnya yang semula berbunyi bangkit dengan damai menjadi berkembang/membangun dengan damai (Shambaugh 2013, 21). Sebagai bagian dari masyarakat dunia, RRT tentu tidak ingin menjadi negara atau bangsa yang tidak disukai atau menjadi yang tersisih dari pergaulan antarbangsa. Kejayaan dan kekuatan yang dimilikinya harus mampu membuatnya terhormat. Dalam tradisi Tiongkok, kehormatan tercantum dalam konsep 面子 *mianzi* (muka). Konsep *mianzi* antara lain mencakup prinsip bahwa 顾面子 *gu mianzi* (menjaga muka), serta 保全面子 *baoquan mianzi* menyelamatkan muka merupakan keharusan yang utama bagi semua manusia sebagai bagian dari masyarakat (Ning 2001).

Perkembangan internal dan eksternal yang melingkupi RRT seiring dengan kebangkitannya, menyebabkan para intelektual dan pemerintah Tiongkok berupaya menemukan keunggulan baru yang mampu menjawab semua tantangan tersebut. Keunggulan itu haruslah datang dari nilai-nilai yang ada dalam warisan budaya Tiongkok sendiri dan Konfusianisme menjadi sumber utama yang dituju. Paparan terdahulu telah mengungkapkan bahwa sejak tahun 1980-an perhatian pada filsafat tradisional termasuk konfusianisme telah muncul. Pada 1984 berdiri *China Confucius Foundation*, diikuti dengan pemberian otoritas kepada kelompok riset konfusianisme kontemporer di Universitas Nankai-Tianjin pada 1986. Perhatian pemerintah semakin nyata setelah peristiwa Tiananmen 1989, yakni dengan penetapan 公民道德建设实施纲要 *gongmin daode jianshi shishi gangyao* (Garis Besar Rencana Implementasi Pembangunan Moral Rakyat) pada 2001 dan 国家‘十一五’时期文化发展规划纲要 *guojia 'shiyi wu' shiqi wenhua fazhan guihua gangyao* (Garis Besar Rencana Pengembangan Budaya Nasional yang menjadi bagian dari Rencana (pembangunan) Lima Tahun Kesebelas) yang ditetapkan pada 2006 (Billioud 2007, 53). Di antara rentang waktu itu (2001–2006), Hu Jintao memopulerkan slogan-slogan yang mencerminkan ajaran Konfusius di dalamnya, termasuk cita-cita untuk mewujudkan dunia yang harmonis yang dicanangkannya pada 2007. Keharmonisan, menurut Hu Jintao, penting untuk keseimbangan sosial dalam masyarakat, menciptakan kedamaian dalam kehidupan bernegara, dan menjaga hubungan baik dalam hubungan luar negeri dengan negara lain. Fokus utama pembangunan Cina bergeser dari peningkatan ekonomi besar-besaran yang dijalankan pada era terdahulu, menuju ke arah keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat.

Hu Jintao juga memperkuat 汉办 *Hanban*, yaitu lembaga multi-departemen yang bertugas mengajarkan bahasa Mandarin ke seluruh dunia dengan membentuk lembaga penyebaran budaya Tiongkok yang diberi nama 孔子学院 *Kongzi Xueyuan* (Institut Konfusius). Saat ini Institut Konfusius sudah berdiri dan berafiliasi dengan berbagai universitas di lebih dari 140 negara, sedangkan jumlahnya di setiap negara bisa lebih dari satu. Contohnya juga dapat ditemukan di Indonesia, bahasan komprehensif tentang perkembangan lembaga ini khususnya yang ada di Universitas Al Azhar Jakarta telah dilakukan Thung Julian (2017). Melihat besarnya jumlah dana yang disediakan pemerintah Tiongkok untuk biaya operasional lembaga itu, sejumlah orang menganggap kebijakan itu sebagai pemborosan, tetapi Hu Jintao bergeming. Pada era Hu Jintao para pejabat Tiongkok tanpa ragu lagi hadir dalam seminar atau forum yang membahas konfusianisme. Penyelenggaraan olimpiade tahun 2008 di Beijing juga menjadi ajang praktik pengakuan RRT akan keunggulan nilai-nilai konfusianisme. Hal itu justru menjadi petunjuk bahwa ada motivasi politis dalam sikap pemerintah Tiongkok itu (Adler 2011). Pada Januari 2011, di lapangan Tiananmen bahkan ditempatkan

patung Konfusius dalam ukuran raksasa seberat 17 ton. Namun, pada April 2011 patung itu dikabarkan menghilang secara misterius (Jacob 2011).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah RRT, khususnya di era Hu Jintao, bersungguh-sungguh dalam upayanya menghidupkan kembali ketokohan Konfusius dan ajarannya, dan mengemasnya sebagai warisan budaya yang dimanfaatkan sebagai kekuatan lunak Tiongkok. Pada akhir masa jabatannya, Hu Jintao (pemerintah Tiongkok) bahkan menjadikan kebijakan itu sebagai bagian dari perjuangan ideologis dan budaya. RRT harus memenangkan pertarungan yang menurutnya sedang terus berlangsung di dunia dan bahkan semakin sengit. Hal itu dapat disimak dalam pidato Hu Jintao yang disampaikan pada sidang pleno keenam Komite Pusat PKT pada bulan Oktober 2012 seperti berikut.

在世界范围内各种思想文化交流交融交锋更加频繁的背景下,谁占据了文化发展制高点,谁拥有了强大文化软实力,谁就能够在激烈的国际竞争中赢得主动。同时,我们必须清醒地看到,国际敌对势力正在加紧对我国实施西化、分化战略图谋,思想文化领域是他们进行长期渗透的重点领域。我们要深刻认识意识形态领域斗争的严重性和复杂性,警钟长鸣、警惕长存,采取有力措施加以防范和应对。(齐 Qi 2012).

Dalam suasana semakin seringnya terjadi pertukaran dan pembauran baik ideologi maupun budaya di dunia, mereka/bangsa yang perkembangan budayanya menempati posisi tertinggi, yang memiliki/memanfaatkan budaya sebagai kekuatan lunak yang kuat, (maka) merekalah yang dapat memenangkan inisiatif dalam persaingan internasional yang sengit. Pada saat yang sama, kita harus dengan sadar memperhatikan bahwa kekuatan musuh internasional sedang meningkatkan strategi westernisasi dan diferensiasi terhadap negara kita, bidang ideologi dan budaya adalah sasaran utama untuk penetrasi jangka panjang mereka. Kita harus memahami dengan mendalam keseriusan dan kompleksitas perjuangan di bidang ideologi, nyalakan alarm, tetap waspada, dan ambil tindakan efektif untuk mencegah dan meresponnya.

Pemanfaatan budaya, khususnya konfusianisme sebagai kekuatan lunak RRT tampaknya tidak berhenti hanya karena berakhir jabatan Hu Jintao. Xi Jinping yang merupakan Presiden RRT pengganti Hu Jintao, ketika berpidato di peringatan 2565 tahun Konfusius juga menegaskan, "meneliti tentang Konfusius dan ajarannya adalah satu cara penting untuk mengenal karakter bangsa Tiongkok dan akar sejarah spiritual bangsa Tiongkok saat ini" (习 Xi 2014). Pernyataan itu menjadi salah satu indikator konfusianisme yang dapat selaras dengan ideologi sosialis-komunis yang dianut RRT hingga saat ini. Konfusianisme adalah basis karakter dan semangat bangsa Tiongkok yang sangat berguna sebagai kekuatan lunak dalam diplomasi budaya yang unggul.

Berlandaskan kronologi sejarah kebangkitan kembali konfusianisme, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan efektivitasnya dalam masyarakat, terlihat bahwa konfusianisme telah menjadi salah satu solusi bagi persoalan sosial, budaya, dan politik yang timbul sebagai dampak negatif dari program reformasi dan keterbukaan yang dijalankan RRT. Contoh yang paling menonjol adalah ketika keutuhan dan kedaulatan RRT terancam karena peristiwa Tiananmen 1989 yang diikuti dengan apa yang disebut evolusi damai, nilai-nilai konfusianisme yang mengedepankan kepatuhan dan bakti telah digunakan oleh Deng Xiaoping untuk merekat kembali kesatuan bangsa dan negara Tiongkok. Bagi masyarakat Tiongkok yang semakin makmur dan meningkat tuntutan hidupnya, ketika harus menghadapi dampak negatif dari program reformasi dan keterbukaan, konfusianisme menjadi acuan moral yang menenangkan. Sementara itu, untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa kebangkitan RRT akan membawa harmoni dan kedamaian kepada dunia, ajaran-ajaran Konfusius juga dimanfaatkan sebagai kekuatan lunak Tiongkok yang unggul. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa konfusianisme telah membuktikan sifat dinamisnya sehingga dapat diterapkan dan diselaraskan dengan kebutuhan Tiongkok yang menganut paham komunis. Dengan memperhatikan secara saksama pemanfaatan keselarasan kedua paham oleh PKT/RRT, dapat disimpulkan bahwa konfusianisme telah berfungsi sebagai sabuk pengaman ketika otoritas PKT/RRT terancam, baik karena faktor internal maupun eksternal sehingga RRT dapat tetap melanjutkan program pembangunannya dan terus bangkit mewujudkan mimpinya menjadi kekuatan dunia.

6. PENUTUP

Kenyataan bahwa konfusianisme dapat diterapkan secara dogmatis dan dinamis memberi peluang untuk selaras dengan komunisme yang merupakan ideologi RRT. PKT/RRT mengambil peluang itu dengan memanfaatkan nilai-nilai moral konfusianisme yang sejalan untuk mengelola berbagai ancaman yang dihadapinya. Nilai-nilai moral utama yang digunakan itu adalah menghindari konflik dengan menciptakan harmoni, saling menghormati berlandaskan hierarki, dan memenuhi ajaran untuk bakti atau patuh kepada yang lebih tinggi (kedudukannya). Konfusianisme tidak menjadi pesaing bagi ideologi komunis, tetapi justru menjadi pelengkap yang cukup andal, bahkan dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman pada masa krisis. Konfusianisme yang telah tumbuh dan berkembang selama ribuan tahun dilihat sebagai perekat masyarakat Tiongkok yang dapat menguatkan legitimasi rezim penguasa. Selain itu, meskipun satu rezim pemerintahan RRT pernah menyalahkan konfusianisme sebagai penyebab keterbelakangan, saat ini konfusianisme adalah *anti-dote* budaya yang ampuh dalam menghadapi serangan westernisasi.

Kemunculan RRT dengan revitalisasi budaya dan peradabannya, terutama yang berbasis konfusianisme menjadi bentuk alternatif yang berbeda dari yang ditawarkan Barat. Sejumlah masalah sosial, budaya, ekonomis, dan politis saat ini terus mengemuka sejalan dengan laju arus kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan gagasan unggul berbasis budaya untuk mengatasinya. Konfusianisme yang mengedepankan harmoni atau keselarasan, humanitas, dan kepatuhan, memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut. Bagi pemerintah Tiongkok revitalisasi nilai-nilai Konfusianisme dapat berfungsi ganda. Secara internal, Konfusianisme berfungsi untuk menenangkan gejolak masyarakat atau bahkan melegitimasi rezim PKT. Secara eksternal, Konfusianisme dapat menepis stigma ancaman yang dilekatkan pada negara dan bangsa Tiongkok. Mengingat bahwa sejak runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991, RRT telah mengambil peran sebagai poros kekuatan sosialis dunia, bukan tidak mungkin jika keunggulan budaya yang berbasis Konfusianisme itu juga dapat ditawarkan untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi berbagai negara dan bangsa di dunia.

DAFTAR REFERENSI

- Adler, Joseph A. 2011. *Confucianism in China Today*. <https://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Writings/Confucianism%20Today.pdf> (diakses pada 6 Juli 2019).
- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2016. Komune. *KBBI daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komune>.
- Bai Shouyi. 2010. *An Outline History of China* (revised edition). Beijing: Foreign Languages Press.
- Billioud, Sebastien. 2007. Confucianism, "Cultural Tradition" and Official Discourse in China at the Start of New Century. *China Perspective* 3: 50–65.
- Billioud, Sebastien and Joel Thoraval. 2007. Jiaohua: The Confucian Revival in China as Educative Project. *China Perspective* 4: 4–20.

- Chesneaux, Jean, Françoise Le Barbier, dan Marie-Claire Bergère. 1977. *China from the 1911 Revolution to Liberation*. New York: Pantheon Books.
- Creel, H.G. 1989. *Alam Pikiran Tiongkok: Sejak Confucius Sampai Mao Zedong*. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Delury, John. 2008. "Harmonious" In China. *Policy Riview*, [April and May]. <http://www.hoover.org/research/harmonious-china> (diakses 8 Maret 2019).
- De Mente, Boye Lafayette. 1996. *NTC's Dictionary of China's Cultural CodeWords*. Illionis: NTC Publishing Group.
- 邓小平 Deng Xiaoping. 1979. 社会主义也可以搞市场经济 (Sosialisme juga boleh menjalankan ekonomi pasar). Dalam 邓小平文选 (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping) 2008. 第二卷 (jilid II): 231-236. 北京:人民出版社 (Beijing: Penerbit Rakyat).
- _____. 1989. 结束严峻的中美关系要由美国采取主动 (Mengakhiri Hubungan Cina-AS yang Kaku, Harus Dimulai dengan Inisiatif AS). Dalam 邓小平文选, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping). 2008. 第三卷 (jilid III) : 330-333. 北京: 人民出版社 (Beijing: Penerbit Rakyat).
- Fan Lizhu dan Chen Na. 2013. Resurgence of Indigenous Religion in China. http://fudan-uc.ucsd.edu/_files/201306_China_Watch_Fan_Chen.pdf (diakses 2 Maret 2019).
- Fairbank, John King dan Merle Goldman. 2006. *China: A New History*. Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Franklin, Lawrence. 2019. China's Modern Blueprint For Global Power. *Nation and State*. 13 Oktober. <https://nationandstate.com/2019/10/13/chinas-modern-blueprint-for-global-power/> (diakses pada 21 Desember 2019)
- 黄道根 Huang Daogen. 1990. 中, 印 (尼) 复交及两国面临世界形势的挑展 (Perbaikan Hubungan Tiongkok-Indonesia dan Tantangan Perkembangan Dunia yang Dihadapi Kedua Negara). *东南亚研究* (Kajian Asia Tenggara) 4.
- 黄维樑 Huang Weilian. 2004. 现代文学的诞生及其背景 (Latar Belakang Kelahiran Sastra Modern). Dalam *中國現代文學導讀* (Pengantar Sastra Tiongkok Moderen). 第一章 (jilid 1). 台北: 揚智 Taipei: Yangzhi.
- Hu Jintao. 2007. Hu Jintao proposes scientific therapy to unleash vitality of socialism. The 17th CPC National Congress, 08:43, October 16. <http://en.people.cn/90002/92169/92188/6283733.html> (diakses 10 Maret 2019).
- Hu Sheng, ed. 1994. *A Concise History of Communist party of China*. Beijing: Foreign languages Press.
- Jacobs, Andrew. 2011. Confucius Statue Vanishes Near Tiananmen Square. *New York Times*, April 22. <https://www.nytimes.com/2011/04/23/world/asia/23confucius.html> (diakses pada 6 Juli 2019).
- Jacques, Martin. 2011. *When China Rules The World* (Ketika China Menguasai Dunia: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat). Terjemahan oleh Noor Cholis. Jakarta: Kompas.
- Jiang Qing dan Daniel A. Bell. 2012. A Confucian Constitution for China. *New York Times*, July 12. <https://www.nytimes.com/2012/07/11/opinion/a-confucian-constitution-in-china.html>, (diakses pada 6 Juli 2019).
- Johnson, Ian. 2017. *The Souls of China: The Return of Religion after Mao*. New York: Pantheon Books.
- Keith, Ronald C. 2009. *China: From the Inside Out*. London: Pluto Press.
- Kurlantzick, Joshua. 2006. China's Charm: Implications of Chinese Soft Power. Dalam *Policy Brief* 47, [June]: 1-8.
- Legge, James, D.D. LL D. 2017. *中英对照四书. The Four Books: Confucian Analects, The Great Learning, The Doctrine of The Mean, and The Works of Mencius; With English Translation and Notes (Classic Reprint)*. London: Forgotten Books.

- Li, Dun J. 1978. *The Ageless Chinese History*. New York: Charles Scribner's Sons.
- MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia). 2012. *Su Si (Kitab Suci yang ke Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu*.
- Mearsheimer, John. 2004. Why China's Rise Will Not Be Peaceful. <http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf> (diakses 4 April 2019).
- Melvin, Sheila. 2007. Modern Gloss on China's Golden Age. *New York Times*, September 3. <https://www.nytimes.com/2007/09/03/arts/03stud.html> (diakses pada 6 Juli 2019).
- Muas, Tuty Enoch. 2009. Hubungan Indonesia-Cina: Secara Historis Dinamis. Dalam *Merangkul Cina*, ed. I. Wibowo & Syamsul Hadi, 23–49. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2015. *Diplomasi Tanpa Kehilangan Muaka: Peran Konsep "Mianzi" di Balik Normalisasi Hubungan Dilomatik Tiongkok-Indonesia Tahun 1990*. Tangerang: Penerbit Serat Alam Media.
- Ning Yu. 2001. What does our face mean to us? *Pragmatics & Cognition* 9, no. 1: 1–36. John Benjamins. <https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/pc.9.1.02yu> (diakses 2 April 2019).
- Oudenaren, John S. Van. 2015. Beijing's Peaceful Evolution Paranoia: The Chinese Communist Party's obsession with the threat of a color revolution is revealing. *The Diplomat*. 1 September. <https://thediplomat.com/2015/09/beijings-peaceful-evolution-paranoia/> (diakses pada 21 Desember 2019).
- Peng Guoxiang. 2010. Inside the Revival of Confucianism in Mainland China: The Vicissitudes of Confucian Classics in Contemporary China as an Example. *Oriens Extremus* 49: 225–235. <http://www.oriens-extremus.de/inhalt/pdf/49/OE49-10.pdf> (diakses pada 4 April 2019).
- People's Daily Online. 2006. China promotes its culture overseas to dissolve "China threat". 28 May 2006. http://en.people.cn/200605/28/eng20060528_269209.html (diakses pada 20 Juli 2019).
- 齐之丰 Qi Zhifeng. 2012. *世界媒体看中国：新年的时空错乱* (Media Dunia Melihat Tiongkok: Kekacauan Ruang dan Waktu di Tahun baru). Diunggah pada 3 Januari 2012. <https://www.voachinese.com/a/article-20120103-world-press-china-136603393/792462.html> (diakses pada 21 Desember 2019).
- Shambaugh, David. 2013. *China Goes Global: The Partial Power*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2016. *China's Future*. Cambridge, USA: Polity Press.
- Thung Julan. 2017. Confucius Institute at Universitas Al Azhar, Jakarta; The unseen power of China. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 18, no. 1: 148–182.
- Wang Feiling. 2015. From Tianxia to Westphalia: The Evolving Chinese Conception of Sovereignty and World Order. Dalam *America, China, and The Struggle for World Order: Ideas, Traditions, Historical Legacies, and Global Visions (Asia Today)*, ed. G. John Ikenberry, Zhu Feng, dan Wang Jisi, 43–68. New York: Palgrave Macmillan.
- Wang Gungwu. 1991. *The Chineseness of China: Selected Essays*. Oxford, New York, Toronto: Oxford University Press.
- Wibowo, I. 2000. *Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Tiongkok: Negara dan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 习近平 Xi Jinping. 2014. *在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会上的讲话* (Pidato dalam Seminar Ilmiah Internasional Memperingati 2565 Kelahiran Konfusius). http://news.xinhuanet.com/2014-09/24/c_1112612018_2.htm (diakses 8 April 2019).
- Xie Shaobo. 2011. Guoxue Re and the Ambiguity of Chinese Modernity. *China Perspective* 1: 39–45. <http://Journals.openedition.org/chinaperspectives/pdf/5378> (diakses pada 20 Desember 2019).
- Yao Xinzong. 2000. *An Introduction to Confucianism*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Yee, Herbert dan Ian Storey, ed. 2002. *The China Threat: Perceptions, Myths and reality*. London, New York: Routledge Curzon.

Zhao Pengfei dan Xiao Genli/赵鹏飞, 肖根黎. 1989. *共和国的成长* (Pertumbuhan Republik) 北京: 农村读物出版社 (Beijing: Penerbit Bacaan Pedesaan).

Zhao Jinkang, Xi Fuqun, Weng Youwei/赵金康, 席富群, 翁有为. 1999. *当代中国政治思想史* (Sejarah Pemikiran Politik Tiongkok Kontemporer). 湖南: 湖南大学出版社 (Hunan: Penerbit Universitas Hunan).